

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD  
KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA PERIODE  
2019-2024**

Muhammad Yusril Dano Hasyim  
NPP. 30.1422

*Asdaf Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

*Email: mysrldano13@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *This research is based on the problem of women's representation in elections and the causes of women's representation in making DPRD members not reach 30 percent.* **Purpose:** *this study was to analyze women's representation in DPRD elections and find out what causes women's representation in the Tidore City DPRD to not reach a quota of 30 percent.* **Method:** *This research method is qualitative with an inductive approach, data collection techniques using interviews and rental.* **Result:** *The results of this study indicate that firstly, the number of women's representation in the election of candidates for DPRD members has reached 30 percent, secondly, the representation of women in the distribution of DPRD members in the City of Tidore Islands, North Maluku Province for the 2019-2024 period did not reach a quota of 30 percent, which is due, among other things, to the absence of a mechanism that regulate the verification and testing of DPRD member candidates at the political party level, the pattern of recruitment of DPRD member candidates through women's organizations is not yet effective, there is still a lack of mass media that provides information about women's political issues, the low interest and seriousness of women to become DPRD members because most women are more focused on taking care of his household as well as the high political costs and the existence of a patriarchal political culture, a culture of identity and closeness politics and a culture of money politics.* **Conclusion :** *The suggestions commented on from this study are the need for regulations regarding the obligations of DPRD member candidates to carry out public verification and testing as proof of self-quality before nomination, especially at the political party level, the need for ongoing outreach to the public to choose their representatives according to their conscience without being influenced by political money and the need to increase the frequency of mass media to present information about women's political issues.*

**Keywords: Representation, Women's, DPRD Elections**

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini didasarkan pada masalah keterwakilan perempuan dalam pemilihan serta penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD tidak mencapai 30 persen. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD serta mengetahui apa saja penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Tidore kepulauan tidak mencapai kuota 30 persen. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, jumlah keterwakilan perempuan dalam pemilihan calon anggota DPRD sudah mencapai 30 persen, kedua keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota tidore kepulauan provinsi maluku utara Periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen yang disebabkan antarlain yaitu belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik, belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi perempuan, masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan, rendahnya minat dan keseriusan perempuan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya serta besarnya biaya politik dan masih adanya budaya politik patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan serta budaya money politics. **Kesimpulan:** Saran yang di ajukan dari penelitian ini adalah Perlu adanya regulasi terkait kewajiban para calon anggota DPRD untuk melaksanakan verifikasi dan uji publik sebagai bukti kualitas diri sebelum pencalonan terutama pada level partai politik, Perlunya sosialisasi secara continiu kepada masyarakat untuk memilih perwakilannya sesuai hati nurani tanpa terpengaruh monay politics dan Perlunya peningkatan frekuensi media massa untuk menyajikan informasi tentang permasalahan politik perempuan. Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, 30 Persen, Pemilihan DPRD.  
**Kata Kunci : Keterwakilan, Perempuan, Pemilihan DPRD**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Mereka telah terlibat sejak Indonesia masih

dijajah dan memperjuangkan kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memandang kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki kedudukan yang sama. Di dasari dengan UUD 1945 tersebut, setiap penduduk Indonesia khususnya kaum perempuan memiliki kebebasan mulai dari diskriminasi struktural dan sistematika dalam hal apapun di kehidupan, terutama dalam hal politik.

Keterlibatan atau partisipasi laki-laki dan perempuan dalam merumuskan kebijakan atau menentukan pilihan dapat berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua lapisan dan terwujudnya keadilan antara laki-laki dan perempuan di negara-negara dengan sistem demokrasi. Budaya patriarki masih melekat pada umumnya dalam kehidupan masyarakat, hal inilah yang menandakan bahwa laki-laki masih pada posisi paling atas. Hal ini terlihat dalam politik Indonesia, di mana banyak perempuan telah terjun ke lapangan, namun hasilnya jauh dari harapan. Semua warga negara Indonesia pada umumnya menganut sistem patriarki, sehingga posisi perempuan dalam masyarakat masih dipandang tidak melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling utama, unggul dan dominan dalam masyarakatnya. (Nimrah & Sakaria, 2015, p. 175).

DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang beranggotakan partai politik dan orang-orang yang dipilih dalam pemilihan umum dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Pada periode 2019-2024, keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan terdiri atas 21 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dalam persentase anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan hanya terdapat 16 persen anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini harus menjadi perhatian karena tuntutan representasi perempuan di bidang politik telah meningkat. Perempuan sudah melewati berpuluh-puluh tahun menghadapi budaya patriarki, sehingga diperlukan sebuah percepatan agar kesetaraan pada aspek jumlah dan aspek peran dalam jabatan-jabatan publik dapat tercapai.

Namun, dilihat dari angka tersebut keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan masih di bawah kuota minimum, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam kaderisasi, karena partai politik telah diberikan amanat dari UU No. 8 Tahun 2012 pasal 52, 53, 54 bahwa partai peserta pemilihan umum mengajukan daftar bakal calon anggota DPRD dengan menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

DPRD kabupaten/kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang beranggotakan partai politik dan orang-orang yang dipilih dalam pemilihan

umum dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Keanggotaan anggota DPRD kabupaten/kota sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan paling banyak 50 orang, dengan jangka waktu 5 tahun dan berakhir pada saat pengucapan sumpah atau janji oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang baru.

Pada periode 2019-2024, keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan terdiri atas 21 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dalam persentase anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan hanya terdapat 16 persen anggota dewan yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini harus menjadi perhatian karena tuntutan representasi perempuan di bidang politik telah meningkat. Perempuan sudah melewati berpuluh-puluh tahun menghadapi budaya patriarki, sehingga diperlukan sebuah percepatan agar kesetaraan pada aspek jumlah dan aspek peran dalam jabatan-jabatan publik dapat tercapai.

Namun, dilihat dari angka tersebut keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan masih di bawah kuota minimum, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam kaderisasi.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Beberapa peneliti juga mengkaji dengan topik yang sama, penulis juga mengkaji dari beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhadam Labolo, Aries Djaenuri, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah pada tahun 2019 mengangkat judul Politik Gender Dan Keterwakila Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. Hasil penelitian ialah Dalam sepuluh tahun terakhir, beberapa tokoh perempuan telah memberikan pertanda positif dalam politik gender di Provinsi Lampung. Kemenangan Chusnunia pada pilkada serentak menjadi tonggak sejarah baru dalam perpolitikan gender lokal dan menjadi pemicu untuk para perempuan lain untuk berani maju pada dunia politik, walaupun sejauh ini kebanyakan dari mereka adalah kalangan elit atau berasal dari dinasti politik.

Ukhti Raqim tahun 2016 mengangkat judul Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga. Hasil penelitian ialah Ketentuan keterwakilan 30 persen perempuan di DPRD Kota Salatiga telah terimplementasi, tapi keanggotaannya belum mencapai angka 30 persen, namun telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan hal tersebut merupakan hal yang bagus. Pada umumnya partai politik mempunyai organisasi sayap perempuan pada struktur partainya. Maka, bukan partai politik yang tidak mempunyai kemampuan dalam kaderisasi perempuan

Siti Nimrah dan Sakaria pada tahun 2015 mengangkat judul Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka. Hasil penelitian ialah Faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pola seleksi antara perempuan dan laki-laki sebagai anggota legislatif yaitu budaya patriarki, partai politik, media massa, dan terakhir tidak adanya jaringan antara organisasi masyarakat, LSM, dan parta-partai politik dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan. Hal tersebut membuat masyarakat selalu berpikiran bahwa politik bukan tempat untuk perempuan tapi tempatnya laki-laki, Perempuan juga dianggap sebagai orang kedua setelah laki-laki.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan pada Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah perbedaan lokus penelitian serta fokus masalah pada penelitian ini yaitu tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan dan apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan tersebut.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2019-2024 dan untuk mengetahui penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Maka diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran objektif terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2019-2024 dan untuk mengetahui penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen. serta sebagai lokasi untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dan mengklasifikasikan data, selanjutnya diteliti secara kualitatif untuk dapat memperoleh pemecahan masalah dari data yang kemudian membuat kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk menanggapi permasalahan sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditulis oleh penulis di bab I yakni Bagaimana keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024, dan Apa saja penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 tidak mencapai kuota 30 persen.

Untuk menjawab penelitian, peneliti akan menyajikan data mengenai persentase jumlah calon DPRD perempuan pada pemilihan legislatif Kota Tidore Kepulauan periode 2009-2014, 2014-2019, dan periode 2019-2024 di setiap daerah pemilihan. Peneliti juga akan menguraikan jawaban dengan teori Keterwakilan Politik Pitikin H. F. (Soeseno, 2013) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yakni: 1. Dimensi formalistik dengan indikator pemahaman politik dari organisasi dan tokoh perempuan, 2. Dimensi yang diwakili dengan indikator informasi politik, 3. Dimensi substansi keterwakilan dengan indikator minat perempuan dan akseptabilitas masyarakat, 4. Dimensi konteks dengan indikator budaya politik dan regulasi.

#### **3.1. Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024**

Ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan pada pencalonan DPRD yang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang sebelumnya adalah UU No. 10 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan baik sejak pemilihan DPRD periode 2009-2014 sampai sekarang.

Pada periode 2014-2019 ke periode 2019-2024, terdapat peningkatan dari jumlah calon DPRD perempuan pada setiap daerah pemilihan, dan persentase dari keterwakilan perempuan juga meningkat pada tiga daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan 1 yang awalnya 42 persen meningkat menjadi 43,20 persen, daerah pemilihan 2 yang awalnya 37,36 persen meningkat 40 persen, dan daerah pemilihan 3 yang awalnya 30 persen meningkat 35,71 persen.

##### **3.1.1 Dimensi Formalistik Dengan Indikator Pemahaman Politik Dari Organisasi Dan Tokoh Perempuan**

Pemahaman Politik Dari Organisasi dan tokoh perempuan adalah indikator dari dimensi Formalistik dari teori yang peneliti gunakan. Berikut adalah pembahasan mengenai indikator organisasi perempuan.

Organisasi perempuan yang paling aktif di Kota Tidore Kepulauan yaitu Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini dipimpin oleh ibu Nurdewa Syafar. Banyak inovasi yang telah muncul berkat perjuangan dari Daurmala.

Diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas dari perempuan dalam proses pembangunan, membuat peraturan daerah No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak korban kekerasan, membentuk program Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak atau disebut dengan program CERIA, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan bapak Abdullah Dahlan (9 Januari 2023) dan bapak Dahlan menyatakan :

Daurmala adalah organisasi keperempuanan yang banyak menjunjung persamaan antara laki-laki dan perempuan, hampir setiap momentum mereka berdiskusi tentang bagaimana supaya perempuan bisa memenuhi syarat pada lembaga legislatif dan supaya mereka bisa memenuhi 30 persen keterwakilan, namun mungkin pola rekrutmen perempuan akan terlibat dalam kegiatan politik yang belum efektif.

Berdasarkan dari gambaran data sekunder (poskomalut.com 2022, Kumparan.com 2021, Ambon.antaranews.com 2019, dan Indotimur.com 2021) belum menggambarkan pola rekrutmen calon DPRD baru yang Didukung oleh Nurdewa Syafar, Riri Aisyah Do Taher, Ratna Namsa yang menjelaskan pola rekrutmen yang dilakukan agar ada perempuan lain untuk duduk dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan selain mereka. Dengan perkataan lain belum efektifnya pola rekrutmen anggota DPRD baru yang di fasilitasi oleh organisasi perempuan dan tokoh Perempuan di Kota Tidore Kepulauan.

### **3.1.2 Dimensi Yang Diwakili Dengan Indikator Informasi Politik**

Informasi Politik adalah indikator dari dimensi yang diwakili dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Divisi Hukum dan Pengawasan bapak Ismail Idris (9 Januari 2023), beliau menyatakan “Media massa rata-rata mereka sering menyoroti mengenai bakat dengan prestasi perempuan-perempuan baik di legislatif dan lainnya”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan ibu Elvira (10 Januari 2023), dan beliau menyatakan “Media massa kan sebenarnya mereka menjaga mereka punya independensi, walaupun ada perempuan yang maju, mereka hanya mempromosikan lewat program-programnya saja, tetapi kalau untuk mengajak mereka tidak lakukan”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, media massa sudah menyajikan informasi mengenai perempuan yang maju ke dunia politik dan tidak memihak kepada siapapun. Media massa juga menyajikan informasi terkait permasalahan politik perempuan yang masih minim.

### **3.1.3 Dimensi Substansi Keterwakilan Dengan Indikator Minat Perempuan Dan Akseptabilitas Masyarakat**

Minat perempuan dan akseptabilitas masyarakat adalah indikator dari dimensi substansi keterwakilan dari teori yang peneliti gunakan. Dilihat dari angka pencalonan anggota DPRD, memang terlihat memenuhi angka 30 persen, tapi tidak bisa dipastikan apakah perempuan tersebut berminat untuk berjuang sampai menjadi anggota DPRD atau hanya sekedar menjadi pelengkap saja.

Sekretaris Dewan ibu Ratna Namsa (10 Januari 2023), beliau menyatakan “Perempuan yang punya minat untuk maju sebagai anggota DPRD masih sedikit, alasannya karena kemampuan yang terbatas untuk *iko ka* dalam kegiatan-kegiatan, perempuan lebih banyak mengurus rumah tangganya, makanya mereka punya perhatian tidak tertuju ke dunia politik.”

Anggota DPRD ibu Asma Ismail (10 Januari 2023), beliau menyatakan: Yang bikin minat perempuan tidak tinggi karena waktu jadi konsekuensi paling utama dalam politik, selain itu biaya politik yang tinggi yang dibutuhkan untuk konsolidasi, tim sukses, dan sebagainya. Karena perempuan cenderung lebih memperhitungkan dan mempertimbangkan mana yang jadi prioritas dalam keuangan keluarga.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari informan di atas, banyak sekali faktor yang akan menjadi tantangan besar ketika seorang perempuan mau maju untuk memperebutkan kursi anggota DPRD. Mulai dari waktu untuk keluarga yang akan banyak tersita, biaya yang besar, tenaga dan pikiran, dan lain-lain. Dikarenakan perempuan lebih cenderung untuk fokus mengurus keluarga, tentunya tidak banyak perempuan yang memiliki minat untuk menjadi anggota DPRD, melihat begitu sulitnya tantangan tersebut.

Selanjutnya, pembahasan mengenai indikator akseptabilitas masyarakat adalah sebagai berikut. Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Abdulharis Doa (10 Januari 2023), dan beliau menyatakan: “Yang mengerti perempuan dari semua problematikanya dan yang bisa bawa aspirasi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jumlah pemilih paling banyak di Kota Tidore Kepulauan adalah perempuan, tapi anggota DPRD perempuan tidak sampai 30 persen, hal ini bisa

disebabkan karena apakah caleg perempuan kurang dipercaya dari kaum mereka sendiri, apakah kaum perempuan kurang yakin kalo orang yang mewakili mereka bisa bawa mereka punya aspirasi, dan bahwa perempuan tidak berdaya karena cuman dianggap sebagai pelengkap. Padahal kalau kaum perempuan memilih caleg perempuan untuk jadi mereka punya perwakilan, pasti perempuan yang jadi anggota DPRD bisa lebih dari 50 persen”

Anggota DPRD ibu Asma Ismail (10 Januari 2023), dan beliau menyatakan : “Menurut saya, masyarakat bukan tidak terima kalau perempuan jadi anggota DPRD atau pemimpin daerah, tapi karena budaya patriarki masih kental di masyarakat, akhirnya anggapan kalo perempuan lebih cocok urus rumah saja dan sebagainya itu masih ada. Masyarakat lebih cenderung pilih laki-laki dengan anggapan laki-laki adalah pemimpin, dan laki-laki memang lebih dominan dalam politik di Kota Tidore Kepulauan.”

Berdasarkan uraian di atas, minat perempuan untuk maju merebutkan kursi anggota DPRD cenderung rendah dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya, ketika perempuan ingin maju sebagai anggota DPRD, maka banyak hal yang harus dikorbankan terutama waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Selanjutnya, dengan adanya budaya patriarki di lingkungan masyarakat Kota Tidore Kepulauan mengakibatkan masyarakat cenderung mendukung laki-laki sebagai pemimpin maupun anggota DPRD. Laki-laki juga menjadi lebih dominan di ranah politik dibandingkan dengan perempuan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi kemauan perempuan dengan indikator minat perempuan dan indikator akseptabilitas masyarakat cenderung rendah dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus mengurus rumah tangga.

#### **3.1.4 Dimensi Konteks Dengan Indikator Budaya Politik Dan Regulasi**

Budaya Politik adalah indikator dari dimensi Konteks dari teori yang peneliti gunakan. Anggota DPRD ibu Riri (10 Januari 2023), beliau menyatakan “budaya patriarki di Kota Tidore Kepulauan itu masih kuat, di saya punya kelurahan saja, yang jadi RT, RW, dan sebagainya itu dapat dominasi dari laki-laki, perempuan-perempuan itu mesti dipaksa dulu baru mereka mau tampil”.

Anggota DPRD ibu Ratna Namsa (10 Januari 2023) juga menyatakan: “Budaya politik yang masih ada di masyarakat Kota Tidore Kepulauan adalah budaya patriarki, akhirnya politik itu masih lebih didominasi oleh laki-laki. Masyarakat juga lebih percaya kalau laki-laki yang jadi anggota DPRD daripada perempuan. Perempuan

yang mau jadi anggota DPRD mesti usaha lebih keras supaya dapat kepercayaan dari masyarakat.”

Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan (9 Januari 2023), beliau menyatakan bahwa “budaya politik di Kota Tidore Kepulauan yaitu masyarakat cenderung memilih karena faktor kedekatan keluarga, faktor kedekatan suku, faktor pertemanan, faktor ras, dan sebagainya. Dominasi ke sukuan dan organisasi itu kuat sekali dalam pemilihan DPRD maupun pemilihan umum di Kota Tidore Kepulauan”

Berdasarkan uraian di atas, budaya politik yang ada di Kota Tidore Kepulauan menjadi hambatan utama untuk para perempuan. Budaya politik tersebut yaitu budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan analisis Peneliti menyimpulkan bahwa Budaya politik tersebut yaitu budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics.

Berkaitan dengan dimensi konteks dengan indikator regulasi, Regulasi adalah indikator dari dimensi konteks dari teori yang peneliti gunakan. Regulasi bukanlah salah satu faktor penghambat yang membuat perempuan yang maju pada pencalonan anggota DPRD kalah. Karena dengan regulasi yang sudah ada bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada pencalonan anggota DPRD. Regulasi-regulasi tersebut yaitu :

- UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 52, 53, 54 mewajibkan partai peserta pemilu untuk memasukkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD.
- UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 56 ayat 2 berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- UU No. 68 Tahun 1958 memuat tentang persetujuan Konvensi hak-hak politik kaum wanita, artinya jaminan kepada perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik telah disahkan.

Anggota KPU Kota Tidore Kepulauan Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Abdul Haris Doa (9 Januari 2023) dan beliau menyatakan bahwa:

Regulasi Undang-Undang tentang 30 persen keterwakilan perempuan belum ada mekanisme yang mengatur di tingkat partai

politik supaya orang-orang yang dimasukkan ke dalam daftar calon anggota DPRD adalah orang-orang yang sudah diverifikasi dan sudah diuji publik. Jadi diperlukan regulasi yang bisa dapat dijadikan rujukan oleh KPU supaya bisa tau kalau orang-orang yang masuk ke dalam daftar calon anggota DPRD ini memang betul berkualitas karena sudah di uji.

Berdasarkan uraian di atas, Meskipun masih belum ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme verifikasi dan uji publik terhadap calon-calon anggota DPRD di tingkat partai politik untuk membuktikan kualitas dari setiap calon anggota DPRD. Namun regulasi-regulasi mengenai pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan sudah berjalan dengan baik dan memang sudah membuka ruang bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi, dibuktikan juga dengan jumlah calon DPRD perempuan pada pemilihan DPRD sudah mencapai 30 persen.

Mengacu pada uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa secara kumulatif pada periode 2019-2024, persentase keterwakilan perempuan calon DPRD telah mencapai 30 persen, namun keterpilihannya belum mencapai 30 persen atau hanya 16 persen (tabel 1.2) sebagai anggota DPRD yang disebabkan belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon anggota DPRD pada tingkat partai politik.

### **3.2. Faktor Penghambat**

Adapun faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan antaralain sebagai berikut :

1. Faktor pertama terdapat pada organisasi dan tokoh perempuan yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Dari data yang peneliti dapat di lapangan bahwa organisasi dan tokoh perempuan di Kota Tidore Kepulauan sudah berperan aktif dalam mempengaruhi hak-hak dan pengaruh besar dalam memperjuangkan kaum perempuan di Kota Tidore Kepulauan. . Banyak inovasi yang telah muncul berkat perjuangan dari organisasi dan tokoh perempuan. Diantaranya yaitu meningkatkan kapasitas dari perempuan dalam proses pembangunan, membuat peraturan daerah No. 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dan anak korban kekerasan, membentuk program Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak atau disebut dengan program CERIA, dan memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Namun dalam wawancara terhadap ketua KPU Kota Tidore Kepulauan dan berita mengenai organisasi dan tokoh

- perempuan yang terdapat pada sub bab 4.2.1.1. bahwa penyebab rendahnya keterwakilan perempuan terdapat pada belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi.
2. Faktor informasi politik yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Peneliti melaksanakan wawancara terhadap beberapa informan terkait informasi politik yang ada di Kota Tidore kepulauan yang terdapat pada sub bab 4.2.1.2. Berdasarkan pernyataan informan yang peneliti dapat adalah masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan.
  3. Faktor regulasi pada partai politik di Kota Tidore Kepulauan. Regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPRD telah membuka ruang dan peluang untuk perempuan yang ada di Kota Tidore Kepulauan dari partai politik masih belum memaksimalkan peraturan tersebut peraturan tersebut dengan baik karena partai politik hanya menjadika perempuan sebagai pelengkap saja dalam pencalonan untuk memenuhi aturan yang berlaku oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang mengatur bahwa calon yang di usulkan dari partai politik adalah calon yang berkualitas, terverifikasi dan teruji publik calon anggota DPRD pada tingkat partai politik. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa informan pada sub bab 4.2.1.4. menyampaikan hal tersebut.
  4. Faktor minat perempuan dan akseptabilitas masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulaun. Dari angka pencalonan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, memang terlihat memenuhi angka 30 persen, tapi tidak bisa dipastikan perempuan tersebut berminat untuk berjuang sampai menjadi anggota DPRD atau hanya sekedar menjadi pelengkap saja. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang peneliti dapat dari beberapa pernyataan informan yang terdapat pada sub bab 4.2.1.3.. Terlihat bahwa masyarakat masih memiliki budaya patriarki yang membuat laki-laki lebih dominan untuk menjadi anggota DPRD dibandingkan perempuan. Selain itu, hasil dari pemilihan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan juga menjadi bukti bahwa pendukung perempuan tidak sebanyak pendukung laki-laki. banyak sekali faktor yang akan menjadi tantangan besar ketika seorang perempuan mau maju untuk memperebutkan kursi anggota DPRD. Mulai dari waktu untuk keluarga yang akan banyak tersita, biaya yang besar, tenaga dan pikiran, dan lain-lain. Dikarenakan perempuan lebih cenderung untuk fokus mengurus keluarga, tentunya tidak banyak perempuan yang memiliki minat untuk menjadi anggota DPRD, melihat begitu sulitnya tantangan tersebut.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan temuan bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan DPR terpilih tidak mencapai kuota 30 persen

diantaranya yaitu, di Kota Tidore Kepulauan sudah ada organisasi perempuan yang berperan aktif dan memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, namun belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi perempuan. Masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan. Belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik. Serta rendahnya minat perempuan dan keseriusan perempuan di Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya, serta besarnya biaya politik. Masih adanya budaya politik patriarki budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics. Tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Jumlah keterwakilan perempuan pada pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan pada periode 2019-2024, terdapat peningkatan dari jumlah keterwakilan perempuan sebagai calon DPRD perempuan di setiap daerah pemilihan sudah mencapai kuota 30 persen. Ketentuan keterwakilan perempuan pada pencalonan DPRD di Kota Tidore Kepulauan telah dilaksanakan dengan baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

-

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024.**
  - a. Jumlah keterwakilan perempuan pada pemilihan DPRD Kota Tidore Kepulauan pada periode 2019-2024, terdapat peningkatan dari jumlah keterwakilan perempuan sebagai calon DPRD perempuan di setiap daerah pemilihan sudah mencapai kuota 30 persen.
  - b. Ketentuan keterwakilan perempuan pada pencalonan DPRD di Kota Tidore Kepulauan telah dilaksanakan dengan baik.
  
- 2. Penyebab keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024 Terpilih Tidak Mencapai Kuota 30 Persen.**
  - a. Di Kota Tidore Kepulauan sudah ada organisasi perempuan yang berperan aktif dan memiliki pengaruh besar dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, namun belum efektifnya pola rekrutmen calon anggota DPRD melalui organisasi perempuan.
  - b. Masih minimnya media massa yang menyajikan informasi mengenai masalah politik perempuan.
  - c. Belum adanya mekanisme yang mengatur verifikasi dan uji publik calon DPRD pada tingkat partai politik.

- d. Rendahnya minat perempuan dan keseriusan perempuan di Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi anggota DPRD dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya, serta besarnya biaya politik. Masih adanya budaya politik patriarki budaya patriarki, budaya politik identitas dan kedekatan, serta budaya money politics.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Mengingat keterbatasan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu politik, khususnya politik gender. Melalui penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD di suatu daerah dan menjadi referensi pada peneliti lain yang mempunyai ketertarikan yang sama.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang menjadi lokasi penelitian skripsi, Dosen pembimbing skripsi yang mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi serta keluarga dan seluruh pihak lain yang membantu peneliti baik secara material maupun non material dalam penyelesaian skripsi ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. , 2019. Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nimrah, S., & Sakaria. , 2015. *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. 1, 173–182.

Soeseno, N. , 2013. *Keterwakilan Politik Perkembangan dari Ajektif Ke Teori*. Depok: Puskapol UI.

Ukhti Raqim. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPR Kota Salatiga*. (Skripsi : Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016): 1

## B. Peraturan

-

## C. Lainnya

Ambon.antaranews.com. (2019). *Daurmala : kesetaraan gender bukan hanya simbolik*. ambon.antaranews.com/berita/58657/daurmala-kesetaraan-gender-bukan-hanya-simbolik

antaranews.com. (2013). *Keterlibatan perempuan Maluku Utara dalam politik minim*.  
<https://www.antaranews.com/berita/370966/keterlibatan-perempuan-maluku-utara-dalam-politik-minim>

antaranews.com. (2019). *Perempuan masih hadapi permasalahan untuk terjun ke politik*.  
<https://www.antaranews.com/berita/804097/perempuan-masih-hadapi-permasalahan-untuk-terjun-ke-politik>

Indotimur.com. (2021). *LSM Daurmala Desak Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Harus Diproses*. <https://indotimur.com/hukrim/lsm-daurmala-desak-kasus-persetubuhan-anak-di-bawah-harus-diproses>

Kumparan.com. (2021). *Sepanjang Pandemi, LSM Daurmala Dampingi 12 Korban Kekerasa Seksual*.  
<https://kumparan.com/ceritamalukuutara/sepanjang-pandemi-lsm-daurmala-dampingi-12-korban-kekerasan-seksual-1wG7XAEqFbh/1>

Poskomalut.com. (2022). *Daurmala Malut Tanggapi Kasus Pemerkosaan IRT di Halsel*. <https://poskomalut.com/daurmala-malut-tangani-kasus-pemerkosaan-irt-di-halsel/>